

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2025
KECAMATAN SIJUK**



SIJUK, AGUSTUS 2025



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025
KECAMATAN SIJUK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

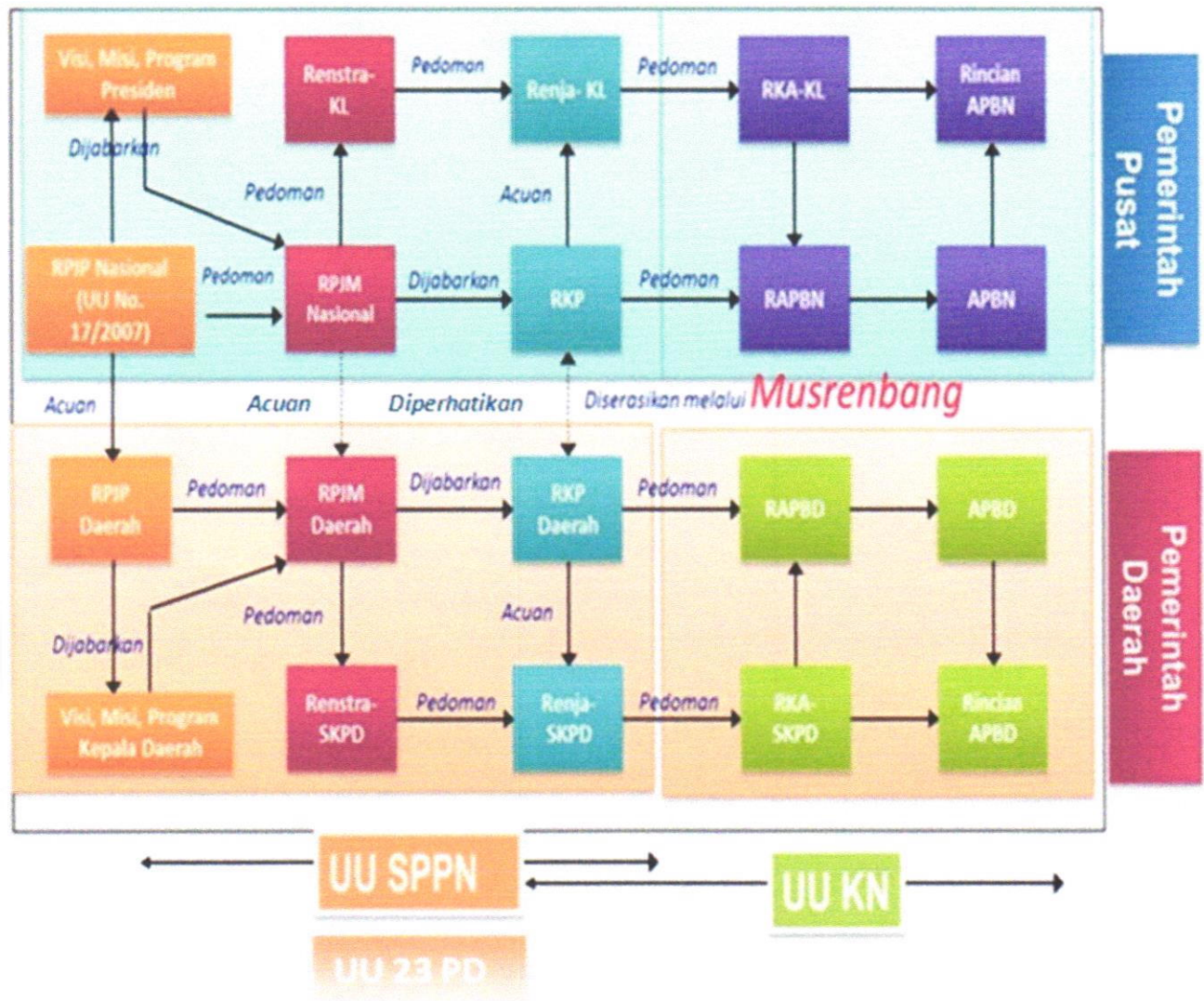
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mmenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan tata cara dalam Penyusunan Renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : 1) Tahapan perumusan rancangan Renja OPD dan 2) Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses Penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah Kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan Evaluasi menjadi Optimal dalam upaya akselerasi program Pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023;
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 14).
21. Peraturan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Tahun 2024 - 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung ini adalah untuk :

1. Menselaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2025.

2. Sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan Pelayanan.
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) Tentang Rencana Pembangunan Tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan Perubahan Rencana dan Penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis (renstra Perangkat Daerah) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tahun 2025 merupakan tahun Kedua dari tahapan pencapaian Renstra 2024 - 2026. Pada tahun 2025 proses penyusunan rencana kerja telah mengacu kepada Perubahan Renstra Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Tahun 2025 Merupakan Penjabaran Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Kedua (2). Pencapaian pada Triwulan II merupakan Pencapaian Bagian dari Rencana Strategis Periode Renstra (tahun 2024 - 2026) berikut pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan 1 tahun 2025
Kabupaten Belitung

Kecamatan Sijuk.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2025)	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (2024)	Target dan realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tk realisasi %		Realisasi Capaian (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4x100)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 76% 100% 100%	100 % 76% 100% 100%	100%	57.76	57.76%	100 %	100 %	100 %
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100%	100%	50%	50%	100 %	100 %	100 %
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100%	100%	0%	0%	100 %	100 %	100 %
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %



Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II disampaikan sebagai berikut

: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota'

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 pada program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima Sub Kegiatan) yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Penyedia Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - c. Penyedia Peralatan Rumah Tangga,
 - d. Penyedia Bahan Logistik Kantor,
 - e. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan,
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Penyedia Jasa surat Menyurat (Materai),
 - b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - c. Penyedia Jasa Pelayanan umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
- d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dari Kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat Realisasi **39,84 %**
Sedangkan dari Capaian Rencana Strategis belum memenuhi sesuai dengan kerangka pencapaiannya.

;

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa Desa dengan Sub Keegiatannya yaitu:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ,
 - b. Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan Sijuk (PKK),

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai autput yang diinginkan dengan tingkat realisasi **27,15 %**
Sedangkan dari Capaian Rencana Strategis telah memenuhi belum sesuai dengan kerangka pencapaiannya.

Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yang direncanakan yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Keegiatannya yaitu:

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa,
- b. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya gguna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Dari kegiatan yang direncanakan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai autput yang diinginkan dengan tingkat realisasi **31,77 %**
Sedangkan dari Capaian Rencana Strategis telah memenuhi sesuai dengan kerangka pencapaiannya

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan 2 (dua) Sub Kegiatan yang direncanakan yaitu :



Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Keegiatannya yaitu:

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa,
- b. Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa,

Dari kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan mencapai output yang diinginkan dengan tingkat realisasi **70,40 %**.

Dengan tidak terlaksananya pelaksanaan kegiatan tersebut secara langsung mempengaruhi pencapaian rencana strategis.

Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sijuk sampai dengan Tahun 2024 - 2026

Evaluasi terhadap Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Sijuk sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah membandingkan capaian target Renstra dengan realisasi pencapaian target tahun 2025. Dari sebanyak 11 kegiatan dari 4 program yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Sijuk Tahun 2024-2026.

Tahun anggaran 2025 rencana strategis Kecamatan Sijuk yang telah dilaksanakan dalam hal, Susunan, visi , misi tujuan sasaran dan program, tetapi dalam mencapai tujuan jangka menengah terdapat beberapa indikator yang belum optimal dilaksanakan dan dicapai terutama dalam upaya pencapaian Indeks Pelayanan Minimal (IPM)

Dari Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, Perencanaan Pembangunan Daerah telah di buat di dalam Renstra Kecamatan Sijuk Tahun 2024 - 2026, terdapat kegiatan – kegiatan yang tidak terlaksana ataupun belum terlaksana. Beberapa hal yang menyebabkan belum terlaksananya kegiatan tersebut diantaranya adalah berubahnya beberapa kebijakan, berubahnya nama kegiatan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Evaluasi RAPBD Kabupaten Belitung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Sijuk adalah melaksanakan fungsi sebagai Pelayanan kepada masyarakat, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Perbup No. 63 Tahun 2016. Kecamatan Sijuk mempunyai tugas pokok melaksanakan Upaya peningkatan Kualitas pelayanan dan mewujudkan Masyarakat maju, mandiri dan sejahtera dengan memfasilitasi pengoptimalan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sijuk telah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sijuk Tahun 2024 – 2026 ,

Kinerja pelayanan Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung berdasarkan sasaran Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelancaran operasional kantor

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Sijuk tetap membutuhkan dukungan operasional kantor yang terus dipenuhi setiap tahunnya secara rutin. Kebutuhan operasional tersebut meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang cetakan, penggandaan, dan Spanduk.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Makanan dan minuman.
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih.
- Kesejahteraan Pegawai non PNS

Dalam rangka peningkatan pelayanan aparatur, Kecamatan Sijuk baru melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 16 (enam belas) macam yang terdiri dari :

- 4 SOP di Seksi Pemerintahan
- 4 SOP di Seksi Ekonomi Pembangunan
- 1 SOP di Seksi Kesejahteraan Sosial
- 4 SOP di Seksi Trantibum dan Pelayanan

- 2 SOP di Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset.

2. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi untuk mendukung kinerja pelayanan di kecamatan Sijuk adalah sebagai berikut :

- Gedung kantor, pagar, tempat parkir dan penataan halaman kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pengadaan peralatan, Mebeleur dan perlengkapan kantor
- Pembangunan sarana olahraga di tingkat kecamatan ;
- Pemeliharaan sarana ibadah, Balai Kecamatan dll .

3. Penyusunan dokumen laporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah

- **LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**, merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- **LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)**, yaitu Laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui PD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri;
- **LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)**, merupakan Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan namun tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak.
Dalam hal ini PD menyampaikan bahan laporan sesuai dengan urusannya;
- Laporan Keuangan PD, yaitu produk akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh PD dan kemudian dijadikan dasar dalam membuat

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4. Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur

Dalam rangka upaya peningkatan disiplin aparatur, Kecamatan Sijuk melaksanakan upaya-upaya dengan penyediaan sarana pendukung sebagai berikut :

1. Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Penyediaan Pakaian Khusus hari tertentu
3. Pengadaan Mesin Absensi dan Ups.

5. Meningkatnya kualitas koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pemerintahan, kesejahteraan sosial , ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Sijuk melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi yang meliputi :

- Pembinaan Keagamaan.
- Pembinaan Perangkat Desa
- Evaluasi perkembangan desa
- Pembinaan nilai-nilai kebangsaan
- Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Seleksi / Pemilihan Bujang Dayang /Duta tk Kecamatan
- Buang Jong dan selamat kampung
- Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Gelar teknologi tepat Guna
- Musrenbangcam
- Pembinaan dan Evaluasi UKS tingkat Kecamatan.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Sijuk sampai dengan Triwulan II tahun 2025 didasarkan pada indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sijuk Tahun 2024 - 2026 sbg berikut :

Tabel : 2 . 2
Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Interval	3,50	3,55	3.755	
2	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sijuk	Persen	85	90	100	
3	Presentase Desa Beradministrasi Baik sesuai ketentuan berlaku	Persen	100	100	100	

Sedangkan Kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Kecamatan Sijuk sampai dengan Triwulan II tahun 2025 didasarkan pada indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sijuk Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel : 2 . 3
Indikator Kinerja Program / Eselon III

No	Indikator Kinerja Program / Eselon III	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2024	2025	2024	2025
1	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh Masyarakat Hasil Musrenbangcam Dapat disetujui di tingkat Kabupaten	Persen	5	5	88,88	
2	Presentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sijuk dan Desa	Persen	85	90	100	
3	Presentase Desa Beradministrasi Baik sesuai ketentuan berlaku	Persen	100	100	100	

Secara umum pelayanan Perangkat Daerah menunjukan kinerja yang belum optimal , hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satu berkenaan dengan hal Penjaringan Aspirasi masyarakat maka penjaringan aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik tidak terlaksana.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sijuk tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk.

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel di bawah ini mengungkap identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal Kecamatan Sijuk dengan p
SWOT.

apkan hasil
pendekatan

Tabel 2 . 4
Analisis SWOT identifikasi faktor internal dan eksternal
Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)
▪ Memiliki	• Terbatasnya dana,	▪ Adanya UU Desa	• Adanya tuntutan

Lanjutan Tabel 2.4.....

FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Tantangan (T)
▪ Sistem Penatausahaan Keuangan, Kepegawaian, Kependudukan, melalui penerapan Teknologi Informasi sudah mulai terbangun, begitu pula dengan Sistem SIMDA. ▪ Adanya skala prioritas dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan. ▪	▪ Belum terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang belum efektif baik dikecamatan maupun didesa	▪ Tersedianya jaringan komputer dan internet (LAN) yang memadai ▪ Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun,askes, dll) ▪ Rencana pengembangan jabatan fungsional	▪ Kesiapan Perangkat Desa dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja Perangkat desa ▪ Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat dinamis ▪ Tuntutan Masyarakat terhadap aparatur yang bebas dari KKN (belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur);

2.4 Perubahan Terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah

Review terhadap rancangan awal RKPD, yaitu proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan untuk mencapai program yang tidak tercapai target kinerja pada tahun sebelumnya atau melebihi target. Berikut Tabel 2.5 hasil Rancangan Awal RKPD tahun 2025 :

Terlampir



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari perangkat daerah kabupaten dikumpulkan berdasarkan hasil - hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan Kabupaten.

Berikut adalah daftar usulan kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat :

Tabel 2.5

Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Perangkat Daerah : Kecamatan Sijuk

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Merupakan Pedoman dalam mewujudkan Perencanaan yang Konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan setiap tahun anggaran dan juga memberikan gambaran kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misinya untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan instropeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan instansi, juga memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah serta Indikator atau ukuran keberhasilan/Kegagalan pada tahun 2024. Selanjutnya memberikan arah kebijakan bagi Kecamatan Sijuk maupun bagi dinas /Instansi terkait dalam menyusun Kebijakan, Program, Anggaran dan Pembangunannya.

Program Prioritas Pembangunan Nasional periode Tahun 2024 - 2026 antara lain meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi. Selain itu untuk mendukung konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pelayanan system logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global.

Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk bahwa untuk mencapai Tujuan Nasional perlu adanya Penguatan dibidang Pelayanan Publik yang berkualitas dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum serta Prestasi Pelayanan Publik di Kecamatan yang bermutu.



3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Tahun 2024 – 2026 yang ingin dicapai dalam pada tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra. Perumusan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah Sebagai berikut :

Tujuan Renja Kecamatan Sijuk dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas di Kecamatan Sijuk.

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sijuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan Sijuk,
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 ada beberapa :

A Sekretariat,

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan Indikator Program yaitu:

1. Presentase dokumen perencanaan, penganggaran , evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan ;

Definisi Operasional (Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan / jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan yang direncanakan) X 100 % dengan kegiatan sebagai berikut :

- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikatornya adalah Dokumen hasil



Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Indikator kegiatannya adalah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah.
2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah,
Definisi Operasional sesuai perhitungan rumusan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indeks Profesionalitas ASN dengan kegiatan sebagai berikut;
- Akuntabilitas Pegawai Perangkat Daerah dengan Indikatornya adalah Kinerja Aparatur yang baik,
3. Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah,
Definisi Operasional, Rata – rata capaian pelayanan administrasi perkantoran (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap – tiap sub kegiatan / total sub kegiatan) X 100 % dengan kegiatan sebagai berikut;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Indikator Kegiatan adalah terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator nya adalah Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran,
4. Presentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
Definisi operasional; Rata – rata capaian pemenuhan sarana prasarana Aparatur (dilihat dari capaian kinerja fisik dari tiap sub kegiatan / total Sub Kegiatan) X 100 % dengan kegiatan sebagai berikut,
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikatornya adalah Jenis barang milik daerah,
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Indikatornya adalah barang milik daerah dalam kondisi baik,

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Dengan Indikator program yaitu Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Definisi operasional, (Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti / jumlah pemberdayaan masyarakat yang ada) X 100 % dengan kegiatan sebagai berikut

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa dengan indikatornya adalah Laporan Hasil Pemberdayaan Desa.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum , dengan Indikator program yaitu Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum .

Definisi operasional, (Jumlah hasil koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

dikecamatan yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan) X 100 % dengan Kegiatan sebagai berikut :



- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan Indikatornya adalah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah,

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa dengan Indikator program yaitu, Presentase desa dan atau Kelurahan taat administrasi.

Definisi operasional (Jumlah Desa dan /atau Kelurahan taat administrasi . Jumlah desa dan . atau Kelurahan) X 100 % dengan kegiatan sebagai berikut,

- Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikatornya adalah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa ;

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Perubahan Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 ini, Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung merencanakan 4 (Empat) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub.Kegiatan. Dengan jumlah total pagu indikatif sebelum Perubahan sebesar Rp. 3.950.778.946.- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Rupiah) dan Pagu indikatif Setelah Perubahan sebesar Rp. 3.588.730.266,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Rupiah) dengan lokasi kegiatan sebagai berikut : Di Kecamatan Sijuk.

Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Belitung murni **Rp. 3.588.730.266.-** Dana Alokasi Khusus Dan Dana Daba

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 Sebagai Berikut :

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sijuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sijuk Tahun 2025 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung serta penyusunan perencanaan anggaran.
2. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai mana table sebagai berikut



Tabel 3.1
Nama Program dan Jumlah Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah anggaran	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	7 Kegiatan 26 Sub.Kegiatan	3.348.793.146,00	3.181.520.466,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan 2 Sub.Kegiatan	104.102.000,00	66.907.000,00
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Kegiatan 2 Sub.Kegiatan	459.398.800,00	316127.800,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan 2 Sub.Kegiatan	38.485.000,00	24.175.000,00
	JUMLAH		3.950.778.946,00	3.588.730.266,00

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Perubahan Renja Kecamatan Sijuk Tahun 2025 secara total sebesar Rp. **3.588.730.266,00**

- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Belitung

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sijuk Tahun 2025 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Belitung Kecamatan Sijuk.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 DAN Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan Dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk Tahun 2025 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sijuk tahun 2025. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sijuk Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Sijuk dalam kerangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Sijuk tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Kecamatan Sijuk dan diiringi peran aktif seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Belitung . Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Sijuk, Agustus 2025
CAMAT JUK

SASTRA YUNI ARDI, S.STP, M.A.P
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 198406172003121001



PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA) TAHUN 2025

Kecamatan Sijuk

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	
								Sebelum	Sesudah	Renja 2025	APBD 2025	Renja Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kecamatan Sijuk									
	7					Unsur Kewilayahan									
	7	01				Kecamatan									
1	7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	3.354.676.546	3.242.489.946	3.181.520.466			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	4.498.600	4.498.600	1.678.200			Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									



						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	999.800	999.800	223.800	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	138.600	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD									
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	499.500	499.500	285.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD									



							Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1				Kabupaten Belitung, Semua	Dana Alokasi	Aparatur dan
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	---------------------------------	-----------------	--------------

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	999.800	999.800	300.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.698.222.466	2.698.242.526	2.697.540.926			Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang / Bulan	21 Orang / Bulan	2.696.722.866	2.696.742.926	2.696.742.926	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapat an Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(D AU), DAU Tambaha n Dukunga n Pendana an atas Kebijakan Penggajia n Pegawai Pemerint ah Dengan Perjanjia n Kerja	Aparatur dan Stakeholder



																	(PPPK)	
	7	01	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	499.800	499.800	169.200	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder				
	7	01	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												



						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	999.800	999.800	628.800	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Pegawai	31 Orang	31 Orang	30.000.000	27.800.000	27.800.000		Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	2 Orang	30.000.000	27.800.000	27.800.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	20 Paket	20 Paket	284.057.900	232.357.900	201.695.300		Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.06	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor									



					01										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7.540.000	7.540.000	5.278.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	48.443.500	48.443.500	38.360.700	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6.274.400	6.274.400	6.274.400	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	124.354.000	124.354.000	108.604.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder





7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Barang Milik Daerah	45 Unit	45 Unit	48.468.780	48.065.320	21.280.440			Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.07	00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	0 Unit	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	50 Unit	0 Unit	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	3 Unit	48.468.780	48.065.320	21.280.440	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder



	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	36 Laporan	36 Laporan	163.962.800	130.784.600	130.784.600		Aparatur dan Stakeholder	
	7	01	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	250.000	250.000	250.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	31.000.000	31.000.000	31.000.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.08	00 03	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	132.712.800	99.534.600	99.534.600	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder



	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kondisi Milik Daerah dalam Kondisi Baik	53 Unit	53 Unit	125.466.000	100.741.000	100.741.000			Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	20.868.000	20.868.000	20.868.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	3 Unit	3 Unit	35.158.000	35.158.000	35.158.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

												Kel/Desa		
	7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.450.000	24.725.000	24.725.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Aparatur dan Stakeholder
2	7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90,00 %	90,00 %	104.102.000	66.907.000	66.907.000		-
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	66.907.000	66.907.000	66.907.000		-
	7	01	03	2.01	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	17.427.000	17.427.000	17.427.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
00 03					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	49.480.000	49.480.000	49.480.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 Pemberdayaan	37.195.000	-	-		
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan												
00 01					Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	3 Pemberdayaan	0 Pemberdayaan	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
00 04					Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	0 Laporan	37.195.000	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna												
00 05												



						Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	0 Laporan	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
3	7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	436.315.400	318.927.800	316.127.800		-
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	436.315.400	318.927.800	316.127.800		-
	7	01	05	2.01	00 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa								
						Jumlah Orang yang mengikuti Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2.250 Orang	2.250 Orang	119.030.600	193.154.000	193.154.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
	7	01	05	2.01	00 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional								



						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	500 Orang	500 Orang	317.284.800	125.773.800	122.973.800	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
4	7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	100%	100%	38.485.000	24.175.000	24.175.000		-
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	38.485.000	24.175.000	24.175.000		-
	7	01	06	2.01	00 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
						Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	17.020.000	17.020.000	17.020.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-



	7	01	06	2.01	00 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
	7	01	06	2.01	00 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
	7	01	06	2.01	00 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
							Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
	7	01	06	2.01	00 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									



							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	21.465.000	7.155.000	7.155.000	Kabupaten Belitung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-
JUMLAH										3.933.578.946	3.652.499.746	3.588.730.266			-

